

Judul : Sistem Perlindungan Anak Di Sekolah Masih Lemah
Tanggal : Jumat, 14 November 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 5

Kasus Perundungan Di Dunia Pendidikan

Sistem Perlindungan Anak Di Sekolah Masih Lemah

Kasus perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi masih membayangi dunia pendidikan Indonesia. Tiga persoalan ini menjadi tanda darurat moral yang perlu segera diatasi secara menyeluruh melalui sistem pendidikan, mulai dari hulu hingga hilir.

WAKIL Ketua Komisi X DPR Kurniasih Mufidayati menegaskan, sekolah seharusnya menjadi ruang yang aman bagi anak-anak untuk tumbuh dan belajar dengan rasa percaya diri. Bukan menjadi tempat yang menakutkan karena adanya kekerasan, pelecehan, atau diskriminasi.

"Perundungan dan kekerasan seksual di sekolah sering kali terjadi karena lemahnya sistem perlindungan anak di satuan pendidikan," ujar Kurniasih dalam keterangannya, Kamis (13/11/2025).

Begitu juga dengan intoleransi di lingkungan pendidikan menjadi ancaman serius bagi masa depan bangsa. Pendidikan seharusnya jadi laboratorium kebencanaan, tempat anak-anak belajar menghargai perbedaan.

"Jika intoleransi dibiarkan, maka generasi muda akan tumbuh dengan kebencian, bukan empati," kata dia, mengingatkan.

Untuk itu, Kurniasih menekankan pentingnya solusi yang komprehensif yang melibatkan semua pihak. Dari hulu, perlu ada penguatan regulasi yang mengikat setiap sekolah memiliki sistem perlindungan anak di sekolah. Sistem ini harus mencakup kebijakan anti-bullying, pencegahan kekerasan seksual, dan pendidikan toleransi.

"Pemerintah Pusat (Pempus)

dan Pemerintah Daerah (Pemda) perlu memastikan adanya anggaran khusus untuk pelatihan guru dan tenaga pendidik agar mampu mendeteksi dini tanda-tanda kekerasan dan intoleransi di lingkungan belajar," usul anggota Fraksi PKS ini.

Kurniasih mendorong integrasi nilai-nilai karakter, moderasi beragama dan literasi sosial-emosional ke dalam kurikulum. Kurikulum harus menumbuhkan empati, menghargai perbedaan dan kemampuan mengelola emosi dan konflik.

"Ini kunci agar siswa tidak hanya cerdas, tetapi juga berjiwa sehat dan beradab," tandasnya.

Di tingkat sekolah, lanjutnya, perlu ada tim khusus yang bertanggung jawab atas keamanan dan inklusivitas lingkungan belajar. Setiap laporan kasus, harus ditangani cepat dan transparan.

"Caranya, mendorong sekolah bekerja sama dengan psikolog, konselor dan lembaga perlindungan anak dalam menyediakan layanan pendampingan dan rehabilitasi," jelasnya.

Dia meminta budaya diam terhadap kekerasan harus diakhiri. Sekolah tidak boleh menjadi tempat yang melindungi pelaku dan mengorbankan korban.

"Setiap anak berhak merasa aman, didengar dan dilindungi."



Kurniasih Mufidayati

tandasnya.

Selain itu, dia meminta perlunya keterlibatan aktif orang tua dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bebas kekerasan dan intoleransi. Pendidikan karakter tidak bisa berhenti di ruang kelas, tapi harus menjadi gerakan sosial bersama.

Pemerintah, guru, orang tua, tokoh agama dan media, harus satu suara melawan kekerasan dan intoleransi. Anak-anak meniru dari apa yang mereka lihat dan dengar.

"Bila orang dewasa memberi teladan kebencian, maka sekolah tidak akan pernah aman," kata dia mengingatkan.

Kurniasih menyoroti pentingnya evaluasi berkala terhadap kebijakan sekolah aman dan inklusif. Caranya, dengan melakukan audit independen untuk menilai sejauh mana kebijakan anti-bullying dan anti-kekerasan dijalankan secara nyata.

"Hasil audit harus dipublikasikan secara transparan agar

publik dapat menilai kemajuan dan mendorong akuntabilitas lembaga pendidikan," kata dia.

Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian menambahkan, praktik perundungan di lingkungan sekolah adalah fenomena yang serius dan tidak dapat ditoleransi. Sebab dampak psikologis korban yang berpotensi ekstrem, termasuk dorongan balas dendam korban kepada pelaku bullying.

"Ketika seorang siswa menjadi korban bullying, dampak psikologisnya bisa sangat dalam sehingga mendorong tindakan yang tidak rasional," kata Hetifah dalam keterangannya, Kamis (13/11/2025).

Hetifah memandang sekolah semestinya menjadi tempat yang aman, nyaman, serta dapat membentuk karakter positif bagi siswa. Bukan malah melahirkan trauma bagi peserta didik.

"Perlunya langkah komprehensif dari seluruh pihak untuk mencegah praktik bullying," kata politikus Golkar ini.

Bagaimana tanggapan Pemerintah? Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan, akan menghadirkan tiga kebijakan untuk menghilangkan masalah dunia pendidikan saat ini. Yaitu perundungan (bullying), kekerasan seksual dan intoleransi. Tujuannya, untuk menciptakan generasi muda yang mampu percaya diri untuk melintasi batas dengan berbagai perbedaan. Terlebih generasi muda masa kini adalah bakal calon pemimpin dunia di masa depan.

"Ini pesan penting agar semua pihak memberikan perhatian ke-

pada generasi muda sebagai insan yang akan memimpin dunia di masa yang akan datang," ujar Mu'ti di Jakarta, Kamis (13/11/2025).

Mu'ti menyebut, ada tiga kebijakan menjadi dasar pembentukan karakter agar generasi muda memiliki sikap yang terbuka dan jiwa yang lapang dada untuk bisa menerima perbedaan. Yaitu, *Deep Learning* atau Pembelajaran Mendalam, Kebijakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, dan Perkuat Bimbingan dan Konseling.

Pendekatan pembelajaran mendalam untuk membentuk generasi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pendekatan ini juga menekankan pendidikan karakter untuk menjadi warga negara dan dunia yang baik.

Sedangkan, kebijakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat adalah bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat dan tidur cepet.

"Melalui 7 kebiasaan ini kami ingin generasi muda lebih banyak beraktivitas sosial dengan berolahraga atau bermasyarakat," harap Sekretaris Umum (Sekum) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah ini.

Terakhir, Perkuat Bimbingan dan Konseling. Orang tua diharapkan bisa menjadi sahabat sekaligus mentor yang baik bagi generasi Z dan generasi Alpha. Sebab banyak kasus kekerasan bisa terjadi karena kurangnya kesabaran orang tua untuk mendengar dan kurang mengapresiasi anak-anak yang sebenarnya memerlukan ruang untuk berbicara. ■ TIF